

Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan

Putriani¹, Samsinar², Kartika Septiary Pratiwi Musa³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Makassar
e-mail: putryputriani784@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020–2022 yang diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio pertumbuhan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian mengalami peningkatan dari 70,0% pada tahun 2020 dengan pola partisipatif menjadi 81,5% dan 85,6% pada tahun 2021 dan 2022 dengan pola delegatif, yang mengindikasikan peningkatan kemandirian daerah. Rasio efektivitas PAD berada pada kategori efektif dengan nilai 92%, 96%, dan 98%, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan secara optimal. Selain itu, rasio pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif dari 7,01% menjadi 10,68%. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah tergolong baik, namun masih menunjukkan adanya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Efektivitas PAD, Pertumbuhan PAD, BAPENDA

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of South Sulawesi Province for the period 2020–2022, measured using the regional financial independence ratio, effectiveness ratio of Local Own-Source Revenue (PAD), and PAD growth ratio. The research method used is descriptive with a quantitative approach, utilizing secondary data obtained from the Budget Realization Report (LRA) through documentation and literature study techniques. The results indicate that the financial independence ratio increased from 70.0% in 2020 (participative pattern) to 81.5% and 85.6% in 2021 and 2022 (delegative pattern), reflecting an improvement in regional financial independence. The effectiveness ratio of PAD remained in the effective category, with values of 92%, 96%, and 98%, indicating the government's ability to optimally achieve revenue targets. Furthermore, the PAD growth ratio showed a positive trend, increasing from 7.01%

to 10.68%. Overall, the financial performance of the region is considered good, although there is still some dependence on transfer funds from the central government

Keywords : Regional Financial Performance, Financial Indepence Ratio, PAD Effectiveness, PAD Growth, BAPENDA

LATAR BELAKANG

Menurut Hutabarat (2020), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan aktivitas keuangan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan dalam mencapai target keuangan, serta efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam sektor publik, kinerja keuangan biasanya dievaluasi melalui analisis rasio keuangan. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dalam aspek seperti:

- 1) Rasio Kemandirian Keuangan, yang menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan tanpa bergantung pada bantuan pusat.
- 2) Rasio Efektivitas, yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 3) Rasio Pertumbuhan, yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kemampuan fiskal daerah dari waktu ke waktu.

Kinerja keuangan juga dapat dilihat dari bagaimana suatu pemerintah daerah menyusun dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk tingkat efisiensi dalam pengeluaran belanja dan keberhasilan dalam mencapai target pendapatan. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan baik adalah yang mampu menyeimbangkan pendapatan dan belanja secara berkelanjutan, serta menghasilkan surplus anggaran yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan menjadi fokus utama untuk melihat sejauh mana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan mampu menjalankan fungsi pengelolaan keuangannya secara profesional, mandiri, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kuantitatif terhadap rasio-rasio keuangan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris tentang kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kinerja fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Menurut Agusta (2020) pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang terjadi dipemerintah daerah. Oleh karena itu analisis kinerja keuangan pada dasarnya merupakan analisis kinerja yang dapat dilakukan terhadap berbagai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Analisis kinerja juga merupakan salah satu gambaran pencapaian yang dapat dicapai dalam operasionalnya, baik dari aspek keuangan, pemasaran, penggalangan dan penyaluran dana, teknologi dan sumber daya manusia.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sulsel dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain, melalui penguatan *taxing power* yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan instansi teknis daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini menjadi komponen penting dalam struktur keuangan daerah karena menjadi sumber dana utama untuk mendanai kegiatan otonomi daerah. Namun, berdasarkan laporan keuangan tahun 2020–2022, meskipun terjadi kenaikan nominal PAD, realisasi PAD terhadap target justru mengalami penurunan. Berikut ringkasan laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2020 hingga 2022:

Tabel 1. Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Tahun 2020-2022

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	PAD Persentase (%)
2020	Rp 4.180.000.000.000	Rp 3.850.000.000.000	92%
2021	Rp 4.280.000.000.000	Rp 4.120.000.000.000	96%
2022	Rp 4.650.000.000.000	Rp 4.560.000.000.000	98%

Sumber: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2020 hingga 2022

Berdasarkan Tabel 1, bahwa kinerja PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan PAD akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga realisasi hanya mencapai 92% dari target. Namun, pada tahun 2021 kinerja mulai membaik dengan realisasi sebesar 96% dari target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 98% dari target, menunjukkan adanya tren positif dalam efektivitas pengelolaan PAD. Secara keseluruhan, meskipun sempat terpengaruh pandemi, BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi sistem pemungutan pajak.

Selain itu, terdapat berbagai fenomena aktual yang memperkuat urgensi penelitian ini:

- Rasio kemandirian keuangan daerah yang masih rendah, menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
- Hilangnya beberapa sumber pendapatan daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan dan pemungutan pajak.
- d. Kelemahan dalam pengelolaan aset daerah, di mana aset-aset yang seharusnya berpotensi menghasilkan PAD belum dikelola secara optimal.
- e. Kontribusi BUMD yang rendah terhadap PAD.

Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan BAPENDA, yang berdampak pada kinerja keseluruhan institusi.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, rendahnya rasio kemandirian dan penurunan efektivitas menjadi indikasi bahwa kinerja keuangan BAPENDA masih belum optimal. Padahal, keberhasilan dalam meningkatkan PAD secara efektif dan efisien sangat menentukan keberlangsungan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Maka dari itu, penting dilakukan analisis menyeluruh terhadap kinerja keuangan BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan BAPENDA, tetapi juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem dan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah, sarana dan prasarana pelayanan pemungutan pendapatan daerah. Belum optimalnya pengelolaan aset milik daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. kontribusi BUMN khususnya perusahaan daerah sulawesi selatan terhadap pemerintah daerah yang masih rendah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan laporan dan data keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah Sulawesi Selatan yang tidak efektif dan masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa BAPENDA masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat untuk membiayai operasional dan pembangunan daerah. Bapenda Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi PAD. Namun, tantangan dalam hal kemandirian pada dana pusat, kurangnya optimalisasi SDM, lemahnya sistem pengelolaan keuangan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas masih menjadi penghambat utama dalam mencapai kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan mengingat pentingnya , mampu berkontribusi terutama untuk BAPENDA Sulsel serta dengan melakukan secara umum untuk mewujudkan pendapatan serta belanja daerah dengan efisien serta efektif. Berpatokan pada latar belakang diatas, peneliti memperoleh ketertarikan dalam melaksanakan penelitian yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel)".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap data yang telah disajikan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020–2022 dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai

kegiatan secara mandiri, tingkat keberhasilan pencapaian target pendapatan, serta perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya peningkatan pengelolaan pendapatan daerah.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Semakin rendah nilai rasio kemandirian, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.

Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Kemandirian (%)
2020	3.850.000.000.000	5.556.757.000.000	70,0%
2021	4.120.000.000.000	5.055.000.000.000	81,5%
2022	4.560.000.000.000	5.328.000.000.000	85,6%

Sumber: Depdagri, Kemendagri, Tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 70,0% yang termasuk dalam pola hubungan partisipatif, menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mampu membiayai kegiatan daerah meskipun masih terdapat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Selanjutnya pada tahun 2021, rasio kemandirian meningkat menjadi 81,5% dan masuk dalam pola hubungan delegatif, yang mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian daerah semakin baik karena pemerintah daerah telah lebih mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dengan kontribusi PAD yang semakin besar. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan rasio kemandirian sebesar 85,6% yang tetap berada pada pola hubungan delegatif, sehingga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin menurun dan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan semakin kuat.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut perhitungan APBD badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan dengan menggunakan rasio efektivitas rumus yang digunakan adalah :

Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil (%)
2020	4.180.000.000.000	3.850.000.000.000	92%

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil (%)
2021	4.280.000.000.000	4.120.000.000.000	96%
2022	4.650.000.000.000	4.560.000.000.000	98%

Sumber: Depdagri, Kemendagri, Tahun 2018

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan tahun anggaran 2020 sebesar 92%, berdasarkan kriteria pengukuran badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan tahun 2018 maka rasio efektivitas PAD tercatat sebesar 92% yang berada dalam kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa capaian PAD masih di bawah target yang telah ditetapkan dalam APBD.

Namun, pada tahun 2021 rasio efektivitas meningkat menjadi 96%, yang termasuk dalam kategori efektif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan telah mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun realisasi penerimaan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Rasio 96% ini menggambarkan bahwa hampir seluruh target penerimaan dapat dicapai, sehingga upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PAD sudah berjalan dengan baik. Penerimaan PAD sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keempat komponen inilah yang menjadi indikator utama dalam menilai kinerja efektivitas BAPENDA.

Selanjutnya, pada tahun 2022, rasio efektivitas kembali meningkat menjadi 98%, yang juga berada dalam kategori efektif. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kinerja pemungutan PAD, di mana target penerimaan semakin realistis dan kemampuan BAPENDA dalam merealisasikannya semakin optimal. Dengan demikian, peningkatan rasio efektivitas dari tahun 2021 ke 2022 mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan pendapatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan semakin banyaknya besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Berikut perhitungan APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan dengan menggunakan rasio pertumbuhan rumus yang digunakan adalah:

Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Pertumbuhan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif

Kurang dari 60%	Tidak Efektif
-----------------	---------------

Sumber: Depdagri, Kemendagri, Tahun 2018

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan tahun anggaran 2020 menunjukkan kenaikan sebesar 13,7%. Angka pertumbuhan positif ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemerintah provinsi dalam menggali potensi pendapatan daerah. Peningkatan ini juga dapat mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi setelah perlambatan akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2022 terhadap 2021, rasio pertumbuhan tercatat sebesar 10,7%. Meskipun pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan tren positif. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah masih mampu meningkatkan penerimaan PAD dari tahun ke tahun, meskipun laju pertumbuhannya mulai melambat. Perlambatan ini bisa diartikan sebagai perlunya strategi baru dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi agar pertumbuhan PAD tetap berkelanjutan dan optimal.

Pembahasan

Pada bagian pembahasan penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil analisis kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2020 - 2022 berdasarkan tiga indikator utama, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio pertumbuhan PAD. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 sampai dengan 2022 masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Mahmudi (2016), rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Semakin rendah nilai rasio kemandirian, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Hal ini sejalan dengan pendapat Siregar (2017) yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam menggali potensi pendapatan asli daerah secara optimal.

Rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya basis pajak daerah, belum optimalnya pemanfaatan potensi retribusi, serta masih rendahnya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu, struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor-sektor informal juga menjadi salah satu penyebab rendahnya

kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, meskipun realisasi PAD menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mendorong terciptanya kemandirian fiskal daerah secara optimal.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa kinerja BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan dalam merealisasikan target PAD selama periode tahun 2020 sampai dengan 2022 tergolong baik. Rasio efektivitas sebesar 92,11% pada tahun 2020 menunjukkan bahwa realisasi PAD hampir mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Pada tahun 2021 dan 2022, rasio efektivitas meningkat menjadi 96,26% dan 98,06%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah. Menurut Hery (2018), rasio efektivitas yang tinggi mencerminkan kemampuan organisasi sektor publik dalam merencanakan dan merealisasikan pendapatan secara tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Peningkatan rasio efektivitas ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh BAPENDA, seperti peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembayaran pajak, serta pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. Selain itu, pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19 juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi PAD pada tahun 2021 dan 2022. Dengan demikian, dari sisi efektivitas, kinerja BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya. Berdasarkan data realisasi PAD, dapat diketahui bahwa terjadi pertumbuhan pendapatan yang positif selama periode penelitian. Realisasi PAD meningkat dari Rp3,85 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,12 triliun pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi Rp4,56 triliun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pada tahun 2020 terjadi perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah daerah mampu melakukan pemulihan dan meningkatkan kinerja pendapatan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Mardiasmo (2018), rasio pertumbuhan yang positif mencerminkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja pendapatan daerah secara berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan PAD yang terjadi masih perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber pendapatan, agar pertumbuhan tersebut tidak hanya bersifat sementara tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kemandirian fiskal daerah.

Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil pembahasan ketiga rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 sampai dengan

2022 menunjukkan kondisi yang cukup baik dari sisi efektivitas dan pertumbuhan, namun masih belum optimal dari sisi kemandirian keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh BAPENDA bukan hanya pada kemampuan merealisasikan target pendapatan, tetapi juga pada kemampuan memperluas basis sumber-sumber PAD. Menurut Prasetyo dan Nugroho (2020), penguatan kemandirian fiskal daerah dapat dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah, serta pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya perumusan strategi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan, seperti penguatan sistem informasi pendapatan daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, serta peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan kinerja keuangan BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin meningkat dan mampu mendorong tercapainya kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2020 sampai dengan 2022, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020–2022 berada dalam kondisi cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio efektivitas yang terus meningkat sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Rasio pertumbuhan PAD juga menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, yang menandakan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan, meskipun pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan telah mampu mengelola pendapatan daerah secara cukup efektif dan terus berupaya meningkatkan kinerja keuangannya. BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan upaya dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dengan cara memperkuat basis pendapatan daerah, mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, serta meningkatkan pengelolaan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain, seperti rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio belanja daerah, serta memperluas periode penelitian agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Nasir, S. S. (2023). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Membangaun Kemandirian Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah. Bengkalis Riau: Dotplus.
- Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Dearah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal Of Applied Managerial Accounting* , 33-41. <https://doi.org/10.30871/Jama.V4i1.1909>
- Arfah, N. R.;& Hariatih, Fitri. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Bdaba Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan. *Akuntansi Dan Manajemen* , 251-262.
- Dr. Francis Hutabarat, M. C. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan. Banten: Desanta Muliavisitama.
- Fahmi, I. (2018). Pengantar Manajemen Keuangan,. Bandung:: Alfabeta.
- Fasilat, A.;& Muhammad, B. (2015). Efektivitas Sistem Internal Dan Keuangan Di Tingkat Pemerintah Daerah Di Nigeria. *Jurnal Internasional Penelitian Manajemen Bisnis (Dampak: Ijrbm)*,3(8), 1-6. *Impact : International Journal Of Research In Business Management (Impact : Ijrbm)* (Vol.3, No. 8)
- Hasnawati. (2024). Financial Performance Analysis Of The South Sulawesi Regional Revenue Agency. *Journal Opf International Accounting Research*, 118-127. *Jiar : Journal Of International Accounting Research* [Doi: https://doi.org/10.62668/Jiar.V4i01](https://doi.org/10.62668/Jiar.V4i01)
- Hidayah. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi . *Jurnal Syamsidar Hidayah B*, 1-17. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/13258>
- Hilda Sasnia Karina;& Dedi Rusdi. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (Bpkkpda) Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmia Sultan Agung*, 2963-2730. *Karinta*
- Hutabarat, (2020). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan . Banten:: Desanta Muliavisitama.
- Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Kesebelas. Depok:Rajawali Pers.
- Mahmudi. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Munawir.S. (2015). Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, S. B. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten Karawang Tahun 2020-2022. *Jurnal Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 101-116. <https://doi.org/10.61132/Pajamkeu.V1i3.274>
- Rahma. (2017). Analisis Kinerja Anggaran Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. *Perspektif Ekonomi Darussalam* , 213-222.
- Rahman, K. G. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Teknologi Yang Terdapat Di Bei. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 198-209. <https://wiyatamandala.e-journal.id/Jba/Article/View/216>
- Rahmawati, N. K. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi* 15.3, 1767-1795. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/Article/View/17858>

- Rosa, S.;& Umaierah, S. A. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Ppendapatan Daerah Ditinjau Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Di Kabupaten Bengkalis. *Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* , 3.
- Rudianto. (2016). *Akuntansi Manajemen* . Jakarta:Erlangga.
- Sholehah, N. D. (2023). *Manajemen Keuangan*. Gorontalo: Cahaya Arsh.
- Sijabat, M. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012. Doctoral Dissertation, Brawijaya University.
- Simorangki, N. ...; & Hotlan Butar-Butar, Saur Melianna. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas Dan Rasio Profitabilitas Pada Pt Bank Sumut Tahun 2016-2020. *Ilmiah Methonomi*, 2598-9693.
- Suranta, S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 111-124. Vol. 5 No. 2 (2017): *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No. 2 Desember 2017
- Susilowati. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12.2. Vol. 12 No. 2 (2016): *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*
- Rizki Sari Eka Putri, & Agus Munandar. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmia Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 3. <https://Journal.Stiemb.Ac.Id/Index.Php/Mea/Article/View/1684>